

Peran pemerintah dan industri jasa keuangan dalam mendukung transformasi digital UKM

Adrian & Samuel Horas Sarjana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, Jakarta, Indonesia

AKURASI

29

Abstract

This article provides information about the role of the Government and Financial Services Industry in Supporting the Digital transformation of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to improve Indonesia's economy. Methodology through Literature Research. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as productive economic enterprises owned by individuals and business entities, based on a survey by the Ministry of Cooperative SMEs in March 2021, amounted to 64.2 million by contributing to Gross Domestic Product (GDP) 61.07% or Rp. 8,573.89 trillion. Digital-based MSME growth is targeted at 24 million in 2023 and 30 million in 2024, while digital-based modern cooperatives are targeted for 400 units in 2023 and 500 units in 2024. Digital transformation of MSMEs not only encourages the use of the marketplace but can also collaborate and increase production capacity so that they can go public and go international—growth in the number of MSMEs in terms of their number and contribution to the economy.

Public interest statement

This article aims to see how effective education and financial literacy for MSMEs by the government and financial institutions can encourage MSMEs to go digital in managing their business.

Keywords: *Financial services industry, financial services authority, digital transformation, MSMEs.*

Paper type: Literature Review

✉ Corresponding:

Adrian. Email: adrian@stie.jayakarta.ac.id

Samuel Horas Sarjana. Email: samuel-horas@stie.jayakarta.ac.id

Received 21 Dec 2022
Revised 27 Dec 2022
Accepted 31 Dec 2022
Online First 03 Feb 2023



AKURASI: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan,
Vol 5, No. 1, 2023, 29-38
eISSN 2685-2888



© The Author(s) 2023

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).use.

Pendahuluan

Pembahasan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha, telah dibahas dalam berbagai artikel, baik mengenai ruang lingkup usaha yang sangat beragam, termasuk permasalahan yang timbul serta bagaimana melakukan pengelolaan maupun usaha untuk memperoleh pendanaannya. Pada artikel ini akan dibahas lebih mendalam bagaimana peran serta pemerintah dan industri jasa keuangan dalam mendukung transformasi digital UMKM. Berdasarkan data sebaran UKM SMESCO, sebagian besar masih berada di pulau Jawa, dengan populasi mikro terbesar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Digitalisasi telah menciptakan berbagai peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Aksesibilitas layanan keuangan kepada UMKM sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan UMKM terhadap guncangan ekonomi. Berdasarkan data Global Entrepreneur and Development Institute tahun 2020, indeks kewirausahaan Indonesia dengan skor 26,0 berada di peringkat 75 dari 137 negara, sedangkan di ASEAN berada di peringkat 6 dari 10 negara. Pada tahun 2021 jumlah UMKM sebanyak 64,2 juta yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07% (senilai Rp8.573,89 triliun).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 76/POJK.07/2016, inklusi keuangan adalah berbagai produk, jasa keuangan, dan lembaga. Berbagai layanan keuangan di dalamnya dapat dipilih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Inklusi keuangan digital merupakan agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Melalui digitalisasi, inklusi keuangan dapat meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi secara berkelanjutan, khususnya di kalangan UMKM, termasuk perempuan dan kaum muda. Melalui kemajuan teknologi, digitalisasi produk dan layanan keuangan serta aktivitas bisnis online dapat mendukung UMKM untuk tetap mempertahankan pendapatan dan kelangsungan usaha di masa pandemi Covid-19. UMKM di Indonesia telah beradaptasi dengan cepat dan siap untuk bisnis berbasis digital. Survei Bank Indonesia yang dilakukan pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa 20% UMKM Indonesia telah efektif memitigasi dampak pandemi melalui digitalisasi bisnis dan pemanfaatan media pemasaran online. Data sisi penawaran menunjukkan adopsi transaksi nontunai, termasuk kartu debit dan uang elektronik, mengalami pertumbuhan yang pesat, tercermin dari nilai transaksi QRIS pada Desember 2021 tumbuh 237% dari tahun sebelumnya mencapai Rp 27,7 triliun.

Artikel ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif edukasi dan literasi keuangan kepada UMKM oleh pemerintah dan lembaga keuangan dapat mendorong UMKM beralih secara digital dalam mengelola usahanya.

Deskripsi kasus

Literasi Keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Transformasi digital didefinisikan sebagai proses yang terjadi pada teknologi digital untuk menciptakan sesuatu yang baru atau memodifikasi model bisnis, budaya dan pengalaman pelanggan yang ada untuk menjawab masalah yang ada serta memenuhi kebutuhan pasar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha, diklasifikasikan berdasarkan ukuran usahanya (Tabel 1).

Tabel 1.*Klasifikasi UMKM*

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp. 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp. 50 juta – Rp. 500 juta	Lebih dari Rp.300 juta – 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp.500 juta – Rp.10 miliar	Lebih dari Rp.2,5 miliar – Rp.50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp.10 miliar	Lebih dari Rp.50 miliar

Sumber: Undang-undang No 20, 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Kementrian Kominfo dari 64,2 juta UMKM yang ada, tercatat memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia lebih dari 60 persen, namun menurut Kementerian Koperasi dan UKM, baru sekitar 8 juta UMKM yang sudah *go online* meskipun memang sudah terdapat peningkatan cukup signifikan dibanding tahun 2021. Pemerintah menargetkan, 30 juta UMKM *onboard digital*, atau masuk ke platform digital pada 2024. Menurut data idEA, terdapat 9,9 juta UMKM yang bergabung ke platform digital sejak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yaitu dalam kurun waktu Mei 2020 hingga Februari 2022.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kuantitatif berdasarkan kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan pembahasan yang ditemukan. Menurut Creswell, John. W. (2014; 40) menyatakan bahwa Kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Penelitian kualitatif bergerak pada konsep permasalahan dari suatu fenomena sosial (Creswell, 2014). Masalah dideskripsikan melalui pertanyaan penelitian sehingga diketahui penyebab masalah atau fenomena tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti publikasi dari Kementerian Koperasi, UKM, OJK, BI, Lembaga Keuangan dan Jurnal.

HASIL DAN EVALUASI

Fenomena pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, sejak awal tahun 2020. Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan guncangan pada sektor kesehatan tetapi juga pada sektor ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2020 menjadi negatif (-2,19%) dari 4,96% pada akhir tahun 2019 (BPS, 2021). Kondisi ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data Asosiasi UMKM Indonesia tahun 2020, terjadi penurunan yang sangat signifikan kontribusi UMKM terhadap PDB yaitu hanya sebesar 37,3% dari PDB (Fauzan, 2021).

Berdasarkan survei UNDP dan LPEM UI (Juli, Agustus 2020) yang melibatkan 1.180 responden pelaku UMKM berdasarkan klasifikasi usaha dan lokasi (Tabel 2, Gambar 1).

Tabel 2.

Distribusi Survey

Propinsi	Mikro	Kecil	Menengah & Besar
Sumatera Utara	42	81	17
Riau	21	26	2
Jakarta	21	34	25
Jawa Barat	78	51	53
Jawa Tengah	41	40	23
Yogyakarta	8	52	31
Jawa Timur	34	70	87
Banten	21	11	14
Bali	6	14	4
NTB	20	42	19
Kalimantan Barat	20	14	2
Sulawesi Selatan	25	10	8
Sulawesi Tengah	12	18	2
Gorontalo	16	26	8
Papua	3	17	11
Total	368	506	306

Sumber : Hasil Survey

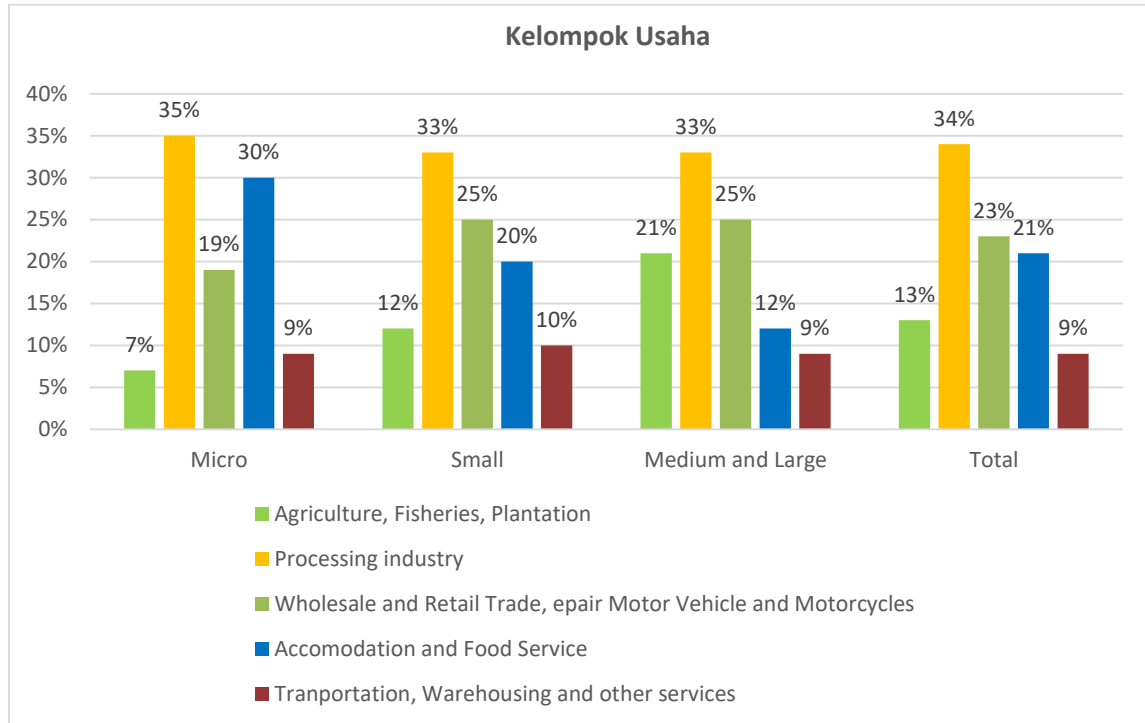


Gambar 1.

Distribusi Survey

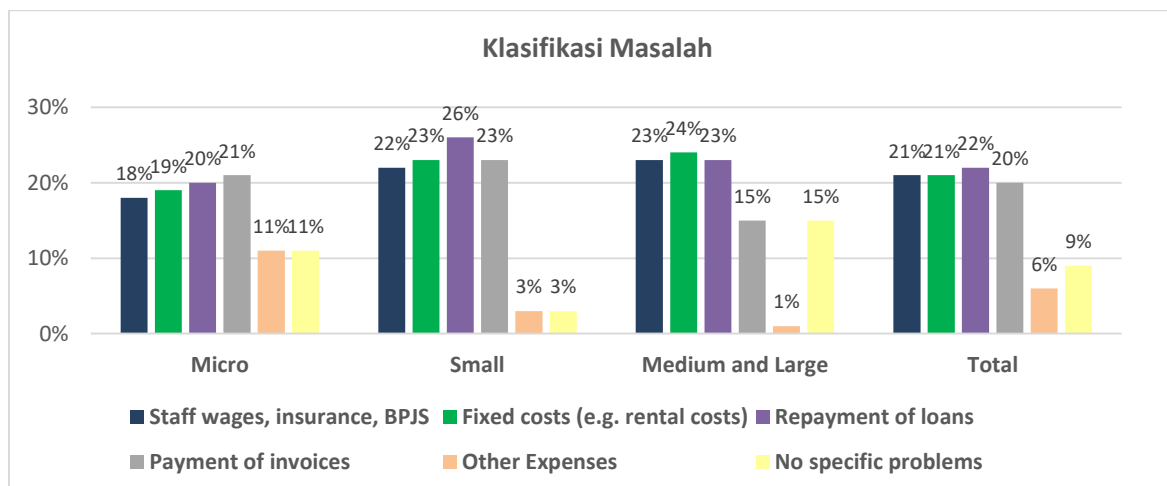
Sekitar sepertiga dari UMKM yang disurvei berada di industri pengolahan. 34% UMKM berada di industri pengolahan, diikuti perdagangan besar dan eceran, industri reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor (23%); akomodasi dan layanan makanan (21%); pertanian, perikanan, perkebunan (13%); dan transportasi, pergudangan, dan jasa lainnya (9%) (Gambar 2),

pada saat itu lebih dari 48% UMKM bermasalah dengan bahan baku, 77% pendapatan menurun, 88% UMKM mengalami penurunan. permintaan produk, bahkan 97% UMKM mengalami penurunan pada nilai aset.



Gambar 2.
Kelompok Usaha

Masalah lain yang dihadapi UMKM selama ini terkait dengan bahan baku, upah karyawan, biaya utilitas, biaya pengiriman, kebutuhan rumah tangga untuk usaha mikro, pajak untuk usaha kecil, kenaikan biaya bahan baku, pengembalian, dan pembayaran cicilan untuk usaha menengah (Gambar 3).



Gambar 3.
Klasifikasi Masalah

Berdasarkan survey tersebut, dapat terlihat bahwa permasalahan yang timbul baik diskala kecil hingga besar diantaranya adalah masalah permodalan, pengelolaan keuangan, pemasaran dan pendampingan dalam kegiatan usahanya serta dukungan dari regulasi pemerintah.

Kebijakan strategis yang dilaksanakan Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta program Bangga Buatan Indonesia (BBI) diharapkan mendukung kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM. Pada Program PEN ini terhadap program Dukungan UMKM antara lain di bidang pembiayaan KUR di masa pandemi, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga/Margin Non KUR, Penempatan Dana/Penempatan Uang Negara, Penjaminan Kredit UMKM, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM ditanggung pemerintah, serta Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima dan Nelayan (BTPKLWN).

Menurut publikasi OJK untuk UMKM, selain pembiayaan melalui sumber pembiayaan: P2P Lending (September 2022 Rp19,4 Triliun, Securities Crowdfunding (Agustus 2022 Rp567,40 Miliar), Digital Micro Waqf Bank (BWM) (September 2022, Rp 102 Miliar, Kredit UMKM Digital (Digiku, Agustus 2022 Rp 305 Miliar), Kredit atau Pembiayaan Kepada Rentenir (KPMR, Juni 2022, Rp 4,4 Triliun), KUR Digital (Kredit Usaha Rakyat), serta pendampingan pembinaan/ UMKM kegiatan yang melibatkan industri jasa keuangan, program bersama UMKM kampus, peningkatan literatur digital & onboarding UMKM, serta membantu kegiatan pemasaran bagi 1.474 pelaku UMKM, melalui UMKM Mu dan platform e-commerce Tokopedia, Shopee.

Dalam rangka mendukung program digitalisasi UMKM, pihak Bank Indonesia juga telah melakukan reformasi regulasi melalui ketentuan BI tentang sistem pembayaran, penyelenggara jasa pembayaran, penyelenggara sistem pembayaran, dan standar nasional sistem pembayaran melalui BI Fast dan QRIS. Pada masa pandemi COVID-19 telah mendorong munculnya babak baru dalam program pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia. Melalui Program Edukasi dan Fasilitasi UMKM Onboarding, Bank Indonesia turut serta dalam memberikan edukasi dan pemberdayaan UMKM secara online, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet dan digitalisasi, serta memberikan semangat baru bagi UMKM untuk dapat bertahan di era pandemi. Pada pelatihan tersebut peserta akan mendapatkan berbagai alternatif solusi, antara lain yang berkaitan dengan aspek produk, foto/promosi produk, dan platform online sebagai saluran pemasaran, dari media sosial hingga marketplace. Dengan mengikuti kegiatan ini, UMKM diharapkan berhasil melakukan onboarding di berbagai platform, mampu memahami sistem pembayaran online (pembayaran digital), dan menguasai berbagai tips terkait pengiriman barang (logistik). Pelatihan ini diikuti oleh UMKM binaan dan UMKM Mitra KPwBI dari seluruh Indonesia. Peserta UMKM akan mendapatkan 12 materi pelatihan online, fasilitasi onboarding pada platform digital, dan 10 sesi webinar (live session) berupa pengayaan materi yang disampaikan oleh narasumber dari platform digital dan praktisi di bidangnya.

Dalam rangka mendorong transformasi ke digital terutama dalam pencatatan informasi keuangan, Bank Indonesia telah meluncurkan pula aplikasi mobile bernama SI APIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan), untuk memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan sebagai acuan bank dalam menganalisis kelayakan pembiayaan UMKM. Standar pencatatannya ini telah mengacu pada aturan standar yang disusun oleh Bank Indonesia bersama Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Sistem pencatatannya pada aplikasi ini menganut sistem *Single Entry*, sesuai dengan transaksi sehingga memudahkan dalam penginputannya dibandingkan dengan menginput berdasarkan akun-akun yang rumit. Hal ini

menjawab kebutuhan akan sistem pencatatan keuangan yang menjadi salah satu faktor kendala bagi UMKM.

SIMPULAN

Program-program yang telah diselenggarakan pemerintah melalui OJK, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM serta lembaga keuangan terkait perlu terus dilakukan sosialisasi dan pendampingan karena masih banyak informasi yang belum tersampaikan akibat bisnis UMKM kegiatan di seluruh pelosok Indonesia. Perlu dilakukan perbaikan dalam pengelolaan data UMKM, pengisian secara mandiri atau dengan melakukan kegiatan pencatatan seperti yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, serta kegiatan sosialisasi yang dapat diselenggarakan dengan lebih baik termasuk dengan berbagai pihak. Peran UMKM sebagai salah satu sumber penopang ekonomi di Indonesia terbukti telah menjadi penyumbang GNP terbesar di Indonesia dan diharapkan dapat tumbuh lebih baik lagi dengan memfasilitasi regulasi kebijakan.

Ucapan terimakasih

Artikel ini diikutsertakan dalam International Conference on Business, Economics and Social Sciences (ICBESS) 2022, kami mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta yang telah memberikan kesempatan dalam mengikuti event ini.

Referensi

- Adrian, A. (2019). Kesiapan sumber daya manusia indonesia dalam era industri 4.0. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta*, 1(1), 33–38.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19: Hasil Pengawasan Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi, Periode 16-25 Februari 2022*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/03/15/5026d1ebbb39697c4d2f280a/perilaku-masyarakat-pada-masa-pandemi-covid-19--hasil-survei-perilaku-masyarakat-pada-masa-pandemi-covid-19.html>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dewi, A. L., & Setiyono, W. P. (2022). The Effect of Financial Literacy, Financial Inclusion, Fintech Crowdfunding on MSME Performance in Sidoarjo Regency. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20, 10–21070.
- Fauzan, R. (2021). Kontribusi PDB UMKM Tahun Ini Diprediksi Turun Hingga 4 Persen. URL: <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20210122/12/1346285/kontribusi-pdb-umkm-tahun-ini-diprediksi-turun-hingga-4-persen>. Diakses Pada Tanggal, 31.
- Kemenko Perekonomian. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-duktungan-pemerintah>.
- Kennedy, P. S. J. (2017). *Literature Review: Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya*.
- Lembaga OJK. (2022). *Peran Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Inklusi dan Digitalisasi UMKM*. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1220/peran-industri-jasa-keuangan-dalam-mendukung-inklusi-dan-digitalisasi-umkm>.

- LPEM FEB UI, U. (2020). *Report Impact Covid-10 Pandemic on MSMEs In Indonesia, September 2020*, Jakarta.
<https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/id/INS-Report-Impact-of-COVID-19-Pandemic-on-MSMEs-in-Indonesia.Pdf>.
- Tarigan, Z. N. A. B., Dewi, F. N., & Pribadi, Y. (2022). Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 15(1), 12–23.
- Tobing, E. H. H., & Adrian, A. (2020). FINTECH ERA AND GOVERNMENT REGULATION. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta*, 1(2), 121–126.

Author information

Authors and Affiliations

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jayakarta, Jakarta, Indonesia

Adrian & Samuel Horas Sarjana

Contributions

All authors contribute equally in the research and publication process.

Corresponding author

Correspondence to [Adrian](#)

Correspondence to [Samuel Horas Sarjana](#)

Ethics declarations

Funding

The author(s) received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

Availability of data and materials

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

Competing interests

No potential competing interest was reported by the authors

Additional information

Publisher's Note

Imperium Research Institute remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations

Rights and permissions

Open Access. This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Cite this paper:

Adrian, A., & Sarjana, S. (2023). Peran pemerintah dan industri jasa keuangan dalam mendukung transformasi digital UKM. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 29-38. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v5i1.795>



AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan

AKURASI: Journal Accounting and Financial Research

Publisher : LPMP Imperium
Frequency : 3 issues per year (April, August, & December)
ISSN (online) : 2685-2888. [SK ISSN](#)
DOI : Prefix 10.36407
Accredited : [SINTA 4](#)